



# LAKIP

## DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

# 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan H. Boejasin No. 32 Telp / Fax. 0512 – 2021374 Pelaihari 70814 Email : [Dinsostala@gmail.com](mailto:Dinsostala@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berhasil kami susun. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyusunan LAKIP untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan Dinas Sosial dalam upaya pencapaian Visi dan perwujudan Misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tanah Laut tahun 2019. Capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2019 beserta realisasinya, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Dinas Sosial tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini tidak hanya akan menjadi laporan fisik (*output*) formal semata, namun jauh lebih penting adalah menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Sosial, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan dan dapat menunjukkan integritas serta kredibilitasnya untuk memperoleh hasil kinerja yang baik untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Diharapkan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders dan masyarakat tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ir. Nor Hidayat**

NIP.19630824 199403 1 007

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Sistematika Penyajian	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Sosial	2
1.5 Tugas Pokok dan fungsi	4
1.6 Produk dan Layanan	5

## **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial	7
2.2 Rencana Kinerja	10
2.3 Penetapan Kinerja	13

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Pengukuran Kinerja	21
3.2 Capaian Kinerja	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja	35
3.4 Realisasi Anggaran	4

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan	49
----------------	----

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah sekaligus aspirasi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga/organisasi secara optimal.

Untuk menggerakkan suatu organisasi dengan efektif dan efisien, diperlukan pendelegasian wewenang agar manajemen organisasi tersebut dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya. Pendelegasian wewenang yang baik, harus disertai dengan sistem pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi dan visi organisasi. Para *stakeholder* (masyarakat umum, legislatif, pemerintah yang lebih tinggi, maupun internal organisasi), berkepentingan untuk dapat mengetahui perkembangan dan menilai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu media yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan sampai sejauh mana perkembangan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sampai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi kewajibannya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini merupakan salah satu wujud dalam usaha pemerintahan yang baik (*good government*) melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut sinergitas antara perencanaan, pengukuran pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut di tahun-tahun berikutnya.

#### b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan akuntabel, serta memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

### 1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2019, capaian kinerja (*performance result*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Secara singkat, masing-masing bagian tersebut berisi:

**Ringkasan Eksekutif**, menggambarkan secara ringkas hal-hal krusial yang patut menjadi perhatian khusus manajemen puncak.

**Bab I – Pendahuluan**, meringkas profil Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

**Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menggambarkan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2018–2023, dan penetapan kinerja (*performance plan*) untuk tahun 2019.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang merupakan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2019 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**Lampiran-lampiran**, memuat tabel sebagai data pendukung akuntabilitas publik yang disajikan dalam LAKIP, yang harus dipahami dengan keseluruhan narasi dalam LAKIP.

### 1.4. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Untuk mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 27 orang dan 16 Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pegn FakMis	Bid.Rehab & PrInd JamSos
1	P N S	27				
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-
-	Pembina Tk.I	-		1	-	-
	Pembina	-		-	-	-
	Penata Tingkat I	III/d		2	1	1
	Penata	III/c		-	2	2
	Penata Muda Tk.I	III/b		1	-	-
	Penata Muda	III/a		1	1	-
	Pengatur Tk.I	II/d		-	-	-
	Pengatur	II/c		3	1	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		1	-	-
	Pengatur Muda	II/a		-	1	-
	Juru Tingkat I	I/d		2	-	-
	Juru	I/c		-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b		-	-	-
	Juru Muda	I/a		-	-	-
2	Honorer Daerah	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	10	3	3

## Komposisi Pegawai Dinas Sosial

berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2

Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pengn FakMis	Bid.Rehab & PrInd JamSos	JUMLAH
1	<b>P N S</b>				
	Strata 2	2	2	1	5
	Strata 1	1	6	4	11
	Diploma III/IV	-	-	-	-
	SMA/Sederajat	8	1	1	10
	SMP/Sederajat	-	-	-	-
	SD/Sederajat	1	-	-	1
2	<b>Honorer/Tidak Tetap/Sukwan/Kontrak</b>				
	Strata 1		2	1	3
	Diploma III/IV	1	1	-	2
	SMA/Sederajat	5	4	2	11
	SMP/Sederajat	-	-	-	-
	SD/Sederajat	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	28	16	9	43

### 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

#### a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yakni :

***Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.***

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d) pelaksanaan administrasi dinas;
- e) pembinaan UPT Dinas; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.6 Produk dan Layanan

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : ***Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***, dan ***visi Dinas Sosial Meningkatkan Pelayanan***

**Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**, maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan	Penanggungjawab
1	Rehabilitasi Sosial	- Anak Terlantar	Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyandang Disabilitas	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Keluarga bermasalah psikologis	Konseling Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Seksi rehabilitasi Sosial
		- ODHA HIV/Aids	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyalahgunaan NAPZA	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
2	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
		- Orang Terlantar, Orang Gangguan Jiwa, Eks Narapidana dan Mayat Terlantar	Shelter di rumah perlindungan sosial dan rujukan	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
3	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	Bantuan Stimulan, Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis dan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
		- Taman Makam Pahlawan dan Situs	Pemeliharaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan



		Perjuangan		Restorasi Sosial
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS</li> <li>- Data PBI</li> <li>- Data penerima KKS</li> </ul>	Verifikasi dan Validasi Data BDT, Data PMKS, Data PBI dan Data Penerima KKS	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
6	Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar</li> <li>- Fakir Miskin</li> <li>- Penyandang Disabilitas Berat</li> </ul>	Verval data penerima bansos dan identifikasi kebutuhan bantuan	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

## BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023

#### a. Visi dan Misi

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis. Adapun visi dan misi Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Tanah Laut yang “Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi”***.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan persoalan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-5 yaitu : ***Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat***. Tujuan akhir Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal

Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis ; sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri sebesar 12,50 % pada tahun 2019 dengan indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dibanding PMKS yang ditangani.
2. Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.
3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Sosial dengan indikator :
  - a. Jumlah aset yang tercatat
  - b. Nilai SAKIP

Selanjutnya penjabaran dari Misi 5 diatas dapat diuraikan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

**1. Membangun Sinergitas untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat.**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat khususnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Hal ini diharapkan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya akebutuhan dasar baik kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

**2. Membangun Sinergitas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Dinas Sosial juga harus membangun kerjasama yang baik dengan sesama pihak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

**3. Membangun Sinergitas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.**

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PMKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi tentunya harus dimanfaatkan dalam sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PMKS, Sistem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan sistem teknologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan ***Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal***

. Dengan indikator :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dibanding PMKS yang ditangani.
- b. Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan

**Tabel 2.1**  
**Misi dan Tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No	Misi	Tujuan		Indikator/Tujuan Sasaran	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dibanding PMKS yang ditangani.
2	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal	1.	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan
					Jumlah Aset yang tercatat dan Nilai SAKIP

**b. Indikator Sasaran**

Setiap sasaran strategi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, kemudian di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dan dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**  
**Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No	Sasaran	Indikator
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS Keseluruhan.
2	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan
3	Tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Sosial	Jumlah Aset yang tercatat dan Nilai SAKIP

**2.2. RENCANA KINERJA**

Rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Sosial disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Tahunan untuk Sasaran Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Esselon II</b>			
<b>1.</b>	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>34,84 %</b>
<b>Esselon III</b>			
<b>2.</b>	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Fakir miskin yang mandiri	<b>0,75%</b>
<b>3.</b>	Meningkatnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikat	<b>100 %</b>
<b>4.</b>	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	<b>12,5 %</b>
<b>5.</b>	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT) di Kab. Tanah Laut	<b>100 %</b>
<b>6.</b>	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri	<b>25 %</b>
<b>7.</b>	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdaya	<b>20 %</b>
<b>8.</b>	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban terdampak bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban bencana yang mampu melaksanakan fungsi sosial	<b>75 %</b>
<b>9.</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	<b>75</b>
<b>10.</b>	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial	<b>100%</b>
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PNS Dinas Sosial	<b>100%</b>
<b>11.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Sosial	Persentase SDM yang bersertifikat	<b>100%</b>
<b>Esselon IV</b>			
<b>12.</b>	Memfasilitasi bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	<b>167</b>
<b>13.</b>	Memfasilitasi bantuan sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah Keluarga Fakir Miskin yang direhab	<b>205</b>

<b>14.</b>	Memfasilitasi bantuan stimulan dan pendampingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga fakir miskin Pedesaan, Perkotaan dan daerah pesisir	Persentase keluarga fakir miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulan UEP KUBE	<b>85</b>
<b>15.</b>	Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan	<b>40</b>
		Jumlah keluarga miskin yang mendapat pembinaan	<b>40</b>
<b>16.</b>	Melaksanakan Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSM Yang Terampil	<b>49</b>
		Jumlah TKSK yang Terampil	<b>11</b>
		Jumlah Pendamping Sosial yang terampil	<b>30</b>
		Jumlah Pengurus orsos dan Karang Tauna yang terampil	<b>144</b>
<b>17.</b>	Memfasilitasi saresehan penanaman pelstarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta saresehan	<b>800</b>
<b>18.</b>	Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Forum CSR	Jumlah perusahaan yang memberika bantuan	<b>50</b>
<b>19.</b>	Melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah data Fakir miskin dan orang tidak mampu yang diverifikasi dan di validasi	<b>29.905</b>
<b>20.</b>	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	jumlah operator data yang di bina	<b>270</b>
<b>21.</b>	Melaksanakan pendataan PMKS	Jumlah PMKS yang di data dan di validasi	<b>10.000</b>
<b>22.</b>	Melaksanakan updating data secara berkala	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	<b>135</b>
<b>23.</b>	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah dokumen MOU pemanfaatan data	<b>10</b>
<b>24.</b>	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	<b>30</b>
<b>25.</b>	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	<b>47</b>
<b>26.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>95</b>
<b>27.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>252</b>
<b>28.</b>	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang	<b>35</b>

		terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	
<b>29.</b>	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	<b>40</b>
<b>30.</b>	Memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	<b>40</b>
<b>31.</b>	Memberikan Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang mengikuti pelatihan	<b>250</b>
		Jumlah KPM yang menerima bantuan stimulan	<b>6.769</b>
<b>32.</b>	Pembinaan Petugas Pendamping PKH yang berpotensi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	<b>49</b>
<b>33.</b>	Memfasilitasi bantuan tanggap darurat/logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan	<b>70</b>
<b>34.</b>	Memfasilitasi pembinaan TAGANA	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana	<b>36</b>
<b>35.</b>	Melaksanakan pelayanan orang terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orang dengan gangguan jiwa melalui rumah perlindungan sosial	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial	<b>40</b>
<b>36.</b>	Memfasilitasi pemulangan Eks Narapidana	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya	<b>70</b>
<b>37.</b>	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial tidak terencana	<b>45</b>
<b>38.</b>	Menyusun Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian	<b>213</b>
		Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	<b>800</b>
		Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana	<b>315</b>
		Jumlah SDM yang difasilitasi	<b>41</b>
<b>39.</b>	Melakukan pengelolaan aset Dinas	Jumlah Aset yang dipenuhi	<b>213</b>
		Jumlah aset yang dipelihara	<b>23</b>
		Jumlah aset yang dimusnahkan	<b>64</b>
		Jumlah aset yang di	

		inventarisasi dan diberi kode	<b>213</b>
<b>40.</b>	Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	<b>4</b>
		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan dan tepat waktu	<b>2</b>
	Menyusun Dokumen Keuangan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai aturan dan tepat waktu	<b>2</b>

## 2.3. PENETAPAN KINERJA

### a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 menjadi acuan dan tolak ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, dimana output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi.

Penyusunan Penetapan kinerja Dinas Sosial mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupatrn Tanah Laut Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
<b>Esselon II</b>					
<b>1.</b>	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>34,84 %</b>	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 991.674.760
			<b>100%</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 85.410.000
			<b>100%</b>	Program peningkatan pengembangan system pelaporan	Rp. 6.298.500



				capaian kinerja dan keuangan	
			<b>1,35%</b>	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 851.151.500
			<b>1,57%</b>	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 270.797.700
			<b>100%</b>	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rp. 15.105.800
			<b>23,95%</b>	Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp. 43.599.750
			<b>4,40%</b>	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 26.3745.000
			<b>1,61%</b>	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Rp. 342.542.500
			<b>100%</b>	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 441.339.700
<b>Esselon III</b>					
<b>2.</b>	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Fakir miskin yang mandiri	<b>0,75%</b>	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Rp. 297.629.000

				Sosial (PMKS) Lainnya	
3.	Meningkatnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikat	100 %	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 567.708.800
4.	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	12,5 %		Rp. -
5.	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT) di Kab. Tanah Laut	100 %	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 281.984.000
6.	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri	25 %	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 270.797.700
7.	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdaya	20 %	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 271.538.500
8.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban terdampak bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban bencana yang mampu melaksanakan fungsi sosial	75 %	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 270.797.700
9.	Meningkatnya	Nilai SAKIP	75	Program	Rp. 6.298.500

	Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Dinas Sosial		peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
10.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 991.674.760
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PNS Dinas Sosial	100%		
11.	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Sosial	Persentase SDM yang bersertifikat	100%		
<b>Esselon IV</b>					
12.	Memfasilitasi bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	167	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	Rp. 236.195.000
13.	Memfasilitasi bantuan sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah Keluarga Fakir Miskin yang direhab	205		
14.	Memfasilitasi bantuan stimulan dan pendampingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga fakir miskin Pedesaan, Perkotaan dan daerah pesisir	Persentase keluarga fakir miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulan UEP KUBE	85	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.	Rp. 61.434.000
15.	Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan	40		
16.	Melaksanakan Pembinaan Potensi dan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pembinaan	40	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Rp. 359.944.000
		Jumlah PSM	49		

	Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Yang Terampil		Masyarakat	
		Jumlah TKSK yang Terampil	<b>11</b>		
		Jumlah Pendamping Sosial yang terampil	<b>30</b>		
		Jumlah Pengurus orsos dan Karang Taruna yang terampil	<b>144</b>		
<b>17.</b>	Memfasilitasi saresehan penanaman pelstarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta saresehan	<b>800</b>	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Rp. 207.764.800
<b>18.</b>	Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Forum CSR	Jumlah perusahaan yang memberika bantuan	<b>50</b>	-	-
<b>19.</b>	Melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah data Fakir miskin dan orang tidak mampu yang diverifikasi dan di validasi	<b>29.905</b>	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Rp. 281.984.000
<b>20.</b>	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	jumlah operator data yang di bina	<b>270</b>		
<b>21.</b>	Melaksanakan pendataan PMKS	Jumlah PMKS yang di data dan di validasi	<b>10.000</b>		
<b>22.</b>	Melaksanakan updating data secara berkala	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	<b>135</b>		
<b>23.</b>	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah dokumen MOU pemanfaatan data	<b>10</b>		
<b>24.</b>	Memberikan/ memfasilitasi pelatihan dan	Jumlah anak terlantar yang mendapat	<b>30</b>		

	praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	pendidikan dan pelatihan			
<b>25.</b>	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	<b>47</b>	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Rp. 105.222.500
<b>26.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>95</b>	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	Rp. 158.522.500
<b>27.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>252</b>	Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	Rp. 342.542.500
<b>28.</b>	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	<b>35</b>	-	-
<b>29.</b>	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	<b>40</b>	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Rp. 43.599.750
<b>30.</b>	Memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	<b>40</b>		
<b>31.</b>	Memberikan Pelatihan dan Bantuan Stimulan	Jumlah KPM yang mengikuti pelatihan	<b>250</b>	Penunjang Program Keluarga	Rp. 271.538.500

	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH)			Harapan (PKH)	
		Jumlah KPM yang menerima bantuan stimulan	<b>6.769</b>		
<b>32.</b>	Pembinaan Petugas Pendamping PKH yang berpotensi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	<b>49</b>		
<b>33.</b>	Memfasilitasi bantuan tanggap darurat/logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan	<b>70</b>	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Rp. 154.606.700
<b>34.</b>	Memfasilitasi pembinaan TAGANA	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana	<b>36</b>		
<b>35.</b>	Melaksanakan pelayanan orang terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orang dengan gangguan jiwa melalui rumah perlindungan sosial	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial	<b>40</b>		
<b>36.</b>	Memfasilitasi pemulangan Eks Narapidana	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya	<b>70</b>		
<b>37.</b>	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial	<b>45</b>		

		tidak terencana			
<b>38.</b>	Menyusun Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian	<b>213</b>		
		Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	<b>800</b>		
		Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana	<b>315</b>		
<b>39.</b>	Melakukan pengelolaan aset Dinas	Jumlah SDM yang di fasilitasi	<b>41</b>		
		Jumlah Aset yang dipenuhi	<b>213</b>		
		Jumlah aset yang dipelihara	<b>23</b>		
		Jumlah aset yang dimusnahkan	<b>64</b>		
<b>40.</b>	Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	<b>4</b>	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 28.199.800
		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan dan tepat waktu	<b>2</b>		
	Menyusun Dokumen Keuangan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai aturan dan tepat waktu	<b>2</b>	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 6.298.500

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selaku pengemban tugas amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai aturan yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Dinas Sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Untuk mempermudah interpretasi hasil pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP adalah :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Baik	
2.	76 – 90	Tinggi	
3.	66 – 75	Sedang	
4.	51 – 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat rendah	

(Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

#### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2018 - 2023.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut disusun dengan mengacu kepada IKU pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat di uraikan dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)



Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Operasional
Meningkatnya Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p><b><u>Jumlah PMKS tahun (n-1) - Jumlah PMKS Tahun (n) x 100%</u></b>  <b><u>Jumlah PMKS tahun (n)</u></b></p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMKS merupakan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• PMKS yang di bantu adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberikan sesuatu dapat berupa uang dan/atau barang guna menangani permasalahan yang dihadapinya.</li> <li>• PMKS yang ditangani adalah masyarakat PMKS yang diberi bantuan selain uang dan barang misalnya Pelatihan keterampilan, pendampingan, konseling, rekomendasi dll.</li> <li>• PMKS Mandiri adalah PMKS yang sudah mendapat Pelayanan kesejahteraan sosial sehingga : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpenuhi kebutuhan dasarnya</li> <li>- Memiliki dan/ tempat tinggal yang layak</li> <li>- Memiliki kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>- Berhenti/mundur sebagai penerima bantuan sosial</li> <li>- Memiliki Usaha Ekonomi Produktif</li> </ul> </li> <li>• PMKS sasaran penanganan adalah masyarakat PMKS yang menjadi target sasaran penanganan misalnya anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, lanjut usia terlantar, penyandang sakit jiwa, dll.</li> <li>• PMKS tahun (n-1) adalah jumlah PMKS tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2018.</li> <li>• PMKS tahun (n) adalah jumlah PMKS tahun ini. Dalam hal ini adalah jumlah PMKS tahun 2019.</li> </ul>

Berikut perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100\% = \\
 & \frac{\text{Jumlah PMKS tahun 2018} - \text{Jumlah PMKS tahun 2019}}{\text{Jumlah PMKS tahun 2019}} \times 100\% = \\
 & \frac{43.394 - 31.847}{31.847} \times 100\% = 36,25 \%
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 34,84%, sedangkan capaian IKU tahun ini mencapai 36,25%.

Pencapaian IKU Dinas Sosial tahun 2019 sangat di dukung oleh program Perlindungan Sosial dan Program Fakir Miskin, baik yang menggunakan dana APBD maupun APBN.

Berikut uraian program kegiatan berdasarkan sumber dana :

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber dana	
				APBD	APBN
1	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Keluarga Fakir Miskin	620 KPM		APBN
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	6.769 KPM		APBN
3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tearlantar	Lanjut Usia Terlantar	252 Orang	APBD	
4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	95 orang	APBD	
5	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	47 orang	APBD	
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Fakir Miskin	Fakir Miskin	167 orang	APBD	
7	Praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Anak terlantar	20 orang	APBD	
8	Pemulangan Eks Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	Eks Narapidana	70 orang	APBD	

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Data PMKS**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	47
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	298
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	4
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	14.312
9	Penyandang Disabilitas	3.049
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-

14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	60
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	43
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	63
22	Korban Bencana Sosial	59
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	13.737
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	49
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
<b>TOTAL</b>		<b>31.847</b>

Di Kabupaten Tanah Laut tidak semua jenis PMKS tersebut dapat terlayani, hanya 10 jenis PMKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berikut jumlah PMKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2019 :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial**  
**Kabupaten Tanah Laut**

<b>No.</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	20
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	47
4	Lanjut Usia Terlantar	272
5	Penyandang Disabilitas	232
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemsayarakat (BWLP)	70
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	40
8	Korban Bencana Alam	18

9	Korban Bencana Sosial	<b>59</b>
10	Fakir Miskin	<b>13.737</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.497</b>

Berikut Kriteria 10 (sepuluh) PMKS yang dapat terlayani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 berdasarkan Permensos No. 08 Tahun 2012 :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria:
  - a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
 

Kriteria :

  - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
 

Kriteria :

  - a. disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana
4. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 

Kriteria :

  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.

5. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
  - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
  - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
6. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
  - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
  - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
  - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
  - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
  - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
8. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;

- b. kerugian harta benda;
  - c. dampak psikologis; dan
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban jiwa manusia;
  - b. kerugian harta benda; dan
  - c. dampak psikologis.
10. Fakir Miskin (FM) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

**a. Capaian Sasaran Strategi**

**1. Sasaran strategi sesuai Renstra dan Target**

Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk itu capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018 - 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase Menurunnya angka PMKS	%	45,52	34,84	

Berdasarkan Tabel 3.4 Pencapaian indikator Persentase PMKS tahun 2019 yang mendapat pelayanan sosial terealisasi sebesar **45,52 %** dari target **34,84%** sehingga capaian Persentase PMKS tahun 2019 yang mendapat pelayanan sosial telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Kabupaten tanah Laut tidak hanya menggunakan dana APBD II, tetapi juga menggunakan dana dari APBD I Provinsi Kalimantan Selatan dan dana APBN dari Kementerian Sosial.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100\% \\
 &= \frac{14.497}{31.847} \times 100 \% \\
 &= 45,52 \%
 \end{aligned}$$

Untuk mengukur Indikator Kinerja (IKU) Kabupaten yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ PMKS Mandiri} &= \left( \frac{\sum \text{PMKS Mandiri}}{\text{PMKS yang ditangani}} \right) \times 100 \% \\
 &= \frac{1350}{14.497} \times 100 \% \\
 &= 9,5 \%
 \end{aligned}$$

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang mengacu pada IKU Kabupaten masih belum mencapai target yang ditetapkan target IKU Kabupaten sebesar 12,5 % baru tercapai 9,5 %, hal ini disebabkan oleh

1. Keterbatasan anggaran dan SDM Kesejahteraan Sosial yang masih sangat terbatas.
2. Data PMKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah.

### **Capaian Sasaran Strategi**

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini dilakukan untuk seluruh indikator kinerja sasaran yang ada di dalam Penetapan Kinerja 2019, dimana di dalamnya sudah termasuk pula indikator-indikator kinerja sasaran yang ada di dalam IKU Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019. Adapun analisis capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran strategis 1 :**

Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan, untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	indikator Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	Rp. 851.151.500	Rp. 721.053.997	80,31
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rp. 61.434.000	Rp. 24.504.700	39,89
		Penunjang program keluarga harapan	Rp. 271.538.500	Rp. 238.418.097	81,84
		Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Rp. 274.820.000	Rp. 256.113.200	82,92
		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	Rp. 236.195.000	Rp. 202.018.000	85,53
		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Rp. 270.797.700	Rp. 129.122.000	47,68
		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak	Rp. 94.601.000	Rp. 60.871.000	64,34



		terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal			
		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Rp. 21.590.000	Rp. 17.650.000	81,75
		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp. 154.606.700	Rp. 50.601.000	32,73
		<b>Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	Rp. 43.599.750	Rp. 38.539.400	88,39
		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Rp. 43.599.750	38.539.400	88,39
		<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	Rp. 26.3745.000	Rp. 159.947.900	60,64
		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Rp. 105.222.500	Rp. 45.491.900	43,23
		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi	Rp. 158.522.500	Rp. 114.456.000	72,20

		penyandang cacat			
		<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo</b>	Rp. 342.542.500	Rp. 283.939.000	82,89
		Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	Rp. 342.542.500	Rp. 283.939.000	82,89
		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Rp. 441.339.700	Rp. 407.383.350	67,19
		Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Rp. 162.590.800	Rp. 197.963.000	72,58

**Sasaran 2 :**

**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**

untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp. 359.944.000	Rp. 209.420.350	62,78

**Sasaran 3 :**

**Tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Sosial**

untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Aset yang tercatat dan Nilai SAKIP	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 1.206.669.870	Rp. 1.060.958.995	87,92
		Program	Rp. 85.410.000	Rp. 60.375.520	54,68

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 6.298.500	Rp. 6.261.000	99,40

### 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

#### A. Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	34,84 %	45,52%	
<p><b>Analisis :</b></p> <p>Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 34,84 % sedangkan realisasinya mencapai 45,52 % atau 10,68 % lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan.</p> <p>Terlampauinya target yang telah ditetapkan tentunya sangat didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2019. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selain didukung oleh dana APBD Kabupaten juga sangat didukung dengan adanya program dan kegiatan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.</p> <p>Program Kementerian Sosial yang sangat signifikan mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara berkesinambungan membantu keluarga sangat miskin dari desil I pada Basis Data Terpadu. Program lain yang juga sangat mendukung adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa program bantuan social pangan yang ditujukan kepada 13.305 KPM dari keluarga miskin, selain itu ada program Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berupa program bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok oleh KPM.</p>					
<b>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>					
2.	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Fakir miskin yang mandiri	0,75%		

3.	Meningkatnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikat	100 %		
4.	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	12,5 %		
5.	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT) di Kab. Tanah Laut	100 %		

**Analisis :**

Dari table di atas menunjukkan bahwa hampir semua target sasaran yang dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mampu mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini sangat ditunjang dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan juga program pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui dana APBD II.

Demikian juga dengan peran PSKS yang terus meningkat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Meningkatnya peran PSKS dapat dilihat dari keterlibatan para PSM, TKSK, Para pendamping sosial, Penyuluh sosial, Tagana dan relawan sosial lainnya dalam mensukseskan program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Peran CSR terlihat masih belum signifikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, namun bukan berarti CSR tidak peduli terhadap para penyandang masalah kesejahteraan di Kabupaten Tanah Laut akan tetapi program-program CSR masih belum terdata oleh Dinas Sosial atau dengan kata lain sasaran dari program CSR masih belum mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial.

Untuk tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu tentunya terus diupayakan untuk lebih akurat dan valid. Tahun 2019 ini data PMKS dan Basis Data Terpadu terus diperbaiki walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan namun data yang ada sudah cukup baik dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

Masih belum tercapainya target pada system data ini sangat dipengaruhi oleh SDM pendata dan operator data di tingkat desa/ kelurahan tidak memiliki ikatan kerja secara langsung dengan Dinas Sosial, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi data sering tidak tepat waktu dan hanya dikerjakan apa adanya.

**Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial**

6.	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri	25 %	9,5%	
7.	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	20 %	10,90%	

		yang berdaya			
<b>8.</b>	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban terdampak bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban bencana yang mampu melaksanakan fungsi sosial	<b>75 %</b>	<b>100%</b>	
<b>Analisis :</b> Pada Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial, belum secara signifikan mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingginya angka PMKS seperti Lanjut usia terlantar dan Penyandang Disabilitas sedangkan program yang menangani kedua jenis masalah tersebut hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar saja dan belum adanya program lain yang mampu membuat kedua penyandang masalah ini bias berdaya dan lebih mandiri. Pada penanganan korban bencana baik bencana alam maupun bencana social telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan program perlindungan social bagi korban bencana merupakan program yang sangat penting karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terdampak bencana yang harus ditangani langsung pada saat terjadi bencana dan pada masa tanggap darurat bencana.					

## B. Capaian Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Dinas Sosial tahun 2019.

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan dapat dicapai dengan pelaksanaan **29 kegiatan** yang terangkum dalam **10 program**.

### 3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran didasarkan pada hasil analisis indikator yang telah ditentukan di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan analisis pencapaian kinerja kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh pada pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam analisis capaian kinerja ini, mengevaluasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam program kegiatan yang dilaksanakan serta solusi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

**Evaluasi dan Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV**

**Tabel 3.4**

**Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka PMKS	34,84 %	45,52 %	$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100\%$ $= \frac{14.497}{31.847} \times 100 \%$ $= 45,52 \%$

**Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
2	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	0,75%	100%	<p>Jumlah keluarga fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibanding dengan populasi Fakir miskin Kab. Tanah Laut tahun 2019.</p> $13.737 : 13.737 \times 100 \% = 100\%$ <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin</b></p>
3	Meningkatnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikat	75%	100%	<p>Jumlah PSKS yang meningkat perannya dalam penyelenggaraan kesos dibanding dengan Populasi PSKS.</p> $273 : 273 \times 100 \% = 100\%$ <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>
4	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mandiri	12,5%	0%	<p>TIDAK ADA DATA</p> <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>
5	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT) di Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	<p>Jumlah data yang mampu diakses dibanding jumlah data secara keseluruhan</p> <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>
6	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri	25%	9,5%	<p>Jumlah PMKS yang terampil dan mandiri dibanding Jumlah PMKS keseluruhan tahun 2019</p> $\% \text{ PMKS Mandiri} = \left( \frac{\sum \text{PMKS Mandiri}}{\text{PMKS yang ditangani}} \right) \times 100 \%$ $= \frac{1350}{14000} \times 100 \%$

	atau rehabilitasi sosial				<b>14.497</b> <b>= 9,5 %</b>  <b>Bidang Rehabilitasi dan perlindungan Jaminan Sosial</b>
7	Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdaya	20%	10,90%	Jumlah KPM PKH yang mandiri dibanding jumlah KPM keseluruhan  $738 : 6769 \times 100 \% = 10,90 \%$  <b>Bidang Rehabilitasi dan perlindungan Jaminan Sosial</b>
8	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban terdampak bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban bencana alam dan korban bencana sosial yang mampu melaksanakan fungsi sosial	75 %	100 %	<b>Bidang Rehabilitasi dan perlindungan Jaminan Sosial</b>

#### Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
6	Memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	167	167	<b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>
7	Memfasilitasi bantuan sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah Keluarga Fakir Miskin yang direhab	200	200	<b>Belum Terprogram</b>  <b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>
8	Memfasilitasi bantuan stimulan dan pendampingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga fakir miskin Pedesaan, Perkotaan dan daerah pesisir	Persentase keluarga fakir miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulan UEP KUBE	100%	100%	Jumlah penerima bantuan stimulan UEP KUBE yang mandiri dibagi jumlah seluruh penerima bantuan UEP KUBE  <b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>

9	Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Persentase keluarga fakir miskin yang melaksanakan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan	25%	9,8%	Jumlah keluarga miskin yang melaksanakan usaha mandiri dibanding jumlah seluruh fakmis di kab. Tanah laut  $1350 : 13.737 =$ <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
10	Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSM Yang Terampil	22	22	Jumlah PSM yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
		Jumlah TKSK yang Terampil	11	11	Jumlah TKSK yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
11		Jumlah Pendamping Sosial yang terampil	30	30	Jumlah Pendamping Sosial yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
12		Jumlah Pengurus orsos dan Karang Tauna yang terampil	144	144	Jumlah pengurus orsos dan Karang Taruna yang terampil  <b>Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas</b>
	Fasilitasi penanaman pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawananan sosial	Jumlah peserta saresehan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	800	800	Jumlah peserta sarasehan



		dan kesetiakawanan sosial			
13	Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Forum CSR	Jumlah dunia usaha yang tergabung dalam Forum CSR	50	0	Tidak tersedia anggaran
14	Melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah data fakir miskin dan orang tidak mampu yang diverifikasi dan di validasi	29.905	29.905	Jumlah Fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhasil diverifikasi dan di validasi di banding jumlah data awal fakmis dan org tidak mampu.  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
15	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	jumlah operator data yang di bina	270	270	Jumlah operator data di desa dan kecamatan yang dilatih dibanding jumlah seluruh operator data didesa dan di kecamatan.  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
16	Melaksanakan pendataan dan validasi data PMKS	Jumlah PMKS yang di validasi	100000		Jumlah PMKS yang didata dan di validasi  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
17	Melaksanakan updating data desa dan kelurahan	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	135	135	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
18	Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan data BDT	Jumlah dokumen MOU pemanfaatan data	10	7	Jumlah data yang digunakan oleh instansi terkait dibanding jumlah

					data pada BDT  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
18	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	20	20	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
19	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	47	47	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
20	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	95	95	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
21	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	252	252	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
22	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	35	35	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial  <b>Seksi Rehabilitasi</b>

					<b>Sosial</b>
23	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	40	40	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
	Memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	<b>40</b>	40	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
	Memberikan Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM PKH mengikuti pelatihan	<b>250</b>	250	Jumlah KPM PKH yang mandiri setelah mendapat Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  <b>Seksi jaminan sosial keluarga</b>
		Jumlah KPM yang menerima bantuan stimulan	6.769	6.769	Jumlah KPM yang menerima bantuan stimulan  <b>Seksi jaminan sosial keluarga</b>
	Pembinaan Petugas Pendamping PKH yang berpotensi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	<b>49</b>	49	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) <b>Seksi jaminan sosial keluarga</b>
	Memfasilitasi bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan logistik	<b>70</b>	122	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan logistik

					<b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Memfasilitasi pembinaan TAGANA	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana	<b>36</b>	36	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Melaksanakan pelayanan orang terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orang dengan gangguan jiwa melalui rumah perlindungan sosial	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial	<b>40</b>	35	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Memfasilitasi pemulangan Eks Narapidana	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya	<b>70</b>	<b>70</b>	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Menyusun Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian	<b>213</b>	<b>213</b>	Jumlah data kepegawaian  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	<b>800</b>	1016	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	<b>315</b>	315	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah SDM yang di	<b>41</b>	41	Jumlah SDM yang di fasilitasi

		fasilitasi			<b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana	<b>315</b>	315	Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah SDM yang di fasilitasi	<b>41</b>	<b>41</b>	Jumlah SDM yang di fasilitasi  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
	Melakukan Pengelolaan Aset Dinas Sosial	Jumlah aset yang dipenuhi	<b>213</b>	<b>213</b>	Jumlah aset yang dipenuhi <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah aset yang di pelihara	<b>23</b>		Jumlah aset yang di pelihara <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah aset yang dimusnahkan	<b>64</b>	<b>64</b>	Jumlah aset yang dimusnahkan <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah aset yang di inventarisasi dan di beri kode	<b>213</b>	<b>213</b>	Jumlah aset yang di inventarisasi dan di beri kode <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
	Menyusun Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dinas sosial	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	<b>4</b>	<b>4</b>	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan <b>Sub Bag Perencanaan dan Keuangan</b>
		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan dan tepat waktu	<b>2</b>	<b>2</b>	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan <b>Sub Bag Perencanaan dan Keuangan</b>
	Menyusun Dokumen keuangan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai aturan dan tepat waktu	<b>2</b>	<b>2</b>	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara Berkala <b>Sub Bag Perencanaan</b>

					<b>dan Keuangan</b>
--	--	--	--	--	---------------------

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Realisasi tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Presentase
1	Belanja tidak Langsung 1.Belanja Pegawai	2.951.580.233,00	1.631.259.573,00	80,88 %
2	Belanja Langsung 1.Belanja Barang dan Jasa 2.Belanja Modal	2.661.272.562,00  217.131.000,00	1.864.598.190,00  202.650.000,00	42,72%  7,14%

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

#### a. Belanja Tidak Langsung

**Belanja Pegawai** : Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran dan Realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Per 31 Desember 2019 Rp.	Per 31 Desember 2018 Rp.
	2.951.580.233,00	1.603.219.264,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut sebesar Rp. 2.951.580.233,00 atau 80,88 %.

#### b. Belanja Langsung

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2019 berdasarkan Program/kegiatan :

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.206.669.870</b>	<b>1.060.958.995</b>	<b>87,92 %</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	85.000.000	51.464.394	60,55%
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.199.800	29.586.176	84,05%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.500.000	3.041.000	67,58%
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000	4.425.000	49,17%
5	Penyediaan alat tulis kantor	25.620.000	22.306.000	87,06%
6	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	9.499.750	6.527.700	68,71%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.100.000	39.233.000	97,84%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.258.000	114.975.000	77,03%
9	Penyediaan makanan dan minuman	30.976.000	29.469.000	95,13%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	388.800.000	388.793.348	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	86.400.000	50.196.200	58,10%
12	Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	342.316.320	320.942.177	93,76%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>110.410.000</b>	<b>60.375.520</b>	<b>54,68%</b>
13	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	38.610.000	32.750.000	84,82%
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.800.000	27.625.520	38,48%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>6.298.500</b>	<b>6.261.000</b>	<b>99,40%</b>
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.298.500	6.261.000	99,40%
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat</b>	<b>897.826.000</b>	<b>721.053.997</b>	<b>80,31%</b>

	<b>Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>			
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	61.434.000	24.504.700	38,89%
	Penunjang program keluarga harapan	291.338.500	238.418.097	81,84%
	Verifikasi dan Validasi data terpadu	308.858.500	256.113.200	82,92%
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin	236.195.000	202.018.000	85,53%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>270.797.700</b>	<b>129.122.000</b>	<b>47,68%</b>
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	94.601.000	60.871.000	64,34%
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	21.590.000	17.650.000	81,75%
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	154.606.700	50.601.000	32,73%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA</b>	<b>15.105.800</b>	<b>10.822.400</b>	<b>71,64%</b>
	Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah	15.105.800	10.822.400	71,64%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	<b>263.745.000</b>	<b>159.947.900</b>	<b>60,64%</b>
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	105.222.500	45.491.900	43,23%
	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	158.522.500	114.456.000	72,20%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN</b>	<b>342.542.500</b>	<b>283.939.000</b>	<b>82,89%</b>



	<b>PANTI ASUHAN / JOMPO</b>			
	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	342.542.500	283.939.000	82,89%
	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>43.599.750</b>	<b>38.539.400</b>	<b>88,39%</b>
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	43.599.750	38.539.400	88,39%
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>441.339.700</b>	<b>407.383.350</b>	<b>67,19%</b>
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	233.574.900	209.420.350	62,78%
	Pelestarian Nilai-Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	272.764.800	197.963.000	72,58%

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategi Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran dalam tahun 2019 yaitu :

1. Angka PMKS dapat diturunkan sebesar 45,52 % walaupun penurunan angka PMKS ini belum menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian PMKS.
2. Peran PSKS semakin meningkat dan telah melebihi target yang ditetapkan. Peran PSKS sangat berpengaruh pada pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Tata kelola pemerintahan dalam hal ini menyangkut administrasi perkantoran Dinas Sosial sebagai penunjang program dan kegiatan teknis telah mencapai target yang telah ditetapkan.

### **4.2 SARAN**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penyusunan LAKIP;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat, dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) serta dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerja.
3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Pelaihari, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ir. Nor Hidayat**  
NIP.19630824 199403 1 007

